

# Menteri Susi Tak Pernah Mau Ubah Kebijakan Penenggelaman Kapal



Menteri KKP Susi Pudjiastuti menenggelamkan 18 Kapal Perikanan Asing (KIA) ilegal di Perairan Pulau Datuk, Mempawah, Kalimantan Barat, Minggu (6/10). Pada tanggal 4 Oktober 2019, sebanyak 3 kapal juga telah dimusnahkan di Sambas. (Foto: KKP)

Nampaknya, kebijakan penenggelaman kapal yang diinisiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan **Susi Pudjiastuti** tidak bisa digoyahkan begitu saja. Pasalnya, dirinya menilai kebijakan tersebut efektif memberi efek jera terhadap pelaku ilegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

Ketika ditanya apakah melelang kapal tangkapan bisa jadi alternatif lain kebijakan, Susi dengan tegas menyatakan menenggelamkan adalah sikap terbaik yang harus diambil.

"Ya, sudah jelas tenggelamkan dong. Kalau dilelang, nanti ditangkap lagi. Kita berapa kali menangkap, sudah begitu dilelang, dibeli sama yang punya (kapal), lalu nangkap lagi. Memangnya kita kurang kerjaan," ujar **Susi Pudjiastuti** saat ditemui di Gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (14/10/2019).

Susi menjelaskan, kalau dilelang, kapal tersebut kemungkinan besar bisa dipakai untuk mencuri ikan lagi. Sehingga, jalan terbaiknya adalah dengan menenggelamkannya.

Namun dalam konteks tertentu, bisa saja kapal tersebut dijadikan monumen untuk pelatihan atau digunakan untuk hal lain selain dilelang.

"Ya, satu, dua kapal bisa, lah (dijadikan monumen), tidak ditenggelamkan. Tapi selebihnya ditenggelamkan," tutur Susi.

Sebagai informasi, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memusnahkan bentuk IUU fishing dengan mengadakan pertemuan dengan aparat hukum di seluruh dunia. Kali ini, KKP bersama INTERPOL kembali menggelar Regional Investigative and Analytical Case Meeting (RIACM) di Jakarta. Susi bersama dengan perwakilan INTERPOL berdiskusi seputar perkembangan kasus kapal STS-50 dan MV Nika.